



## ETIKA DAN AKUNTABILITAS PELAYAN PUBLIK DALAM TATA KELOLA PEMERINTAH TERKAIT KONSEP “DYNAMIC GOVERNANCE”

Sisman Prasetyo

Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta [sismanprasetyo@gmail.com](mailto:sismanprasetyo@gmail.com)

### Abstrak

Konsep etika dan akuntabilitas pelayan publik dalam tata kelola pemerintahan dari good governance, ke *dynamic governance*, merupakan sebuah konsep rujukan yang dianggap dapat merubah aktivitas pemerintahan dengan baik. Konsep tata kelola pemerintah apa pun yang diadopsi menyiratkan untuk menolak berbagai bentuk aktivitas pemerintah yang didasari dari kegiatan otoritarian, korupsi, kolusi, dan nepotisme yang akan membuka peluang tindakan-tindakan jahat lainnya dalam melaksanakan aktivitas pemerintah. Dalam konteks inilah pemerintahan yang dinamis (*dynamic governance*) menjadi sentral dalam menjawab tantangan yang dihadapi oleh pemerintah saat ini sehingga lahirlah sebuah inovasi terkait E-government dimana merupakan upaya untuk mendukung kinerja pemerintah yang berbasis elektronika dalam rangka penyelenggaraan dan peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat secara efektif dan efisien Tujuan penulisan ini berusaha memberikan kontribusi pengetahuan dengan mengeksplorasi konseptual teoritis dan membandingkan di antara konsep tersebut dari literatur ilmiah yang relevan makalah penulisan ini merupakan *synthesis of qualitative research*, dengan menggunakan metode *meta-theory (the analysis of theory)*. Penulisan ini berusaha untuk mengidentifikasi beberapa bukti tertulis yang ada mengenai tema penelitian. Hasil penelitian mengungkapkan, Etika dan Akuntabilitas pelayan publik dalam tata kelola pemerintah terkait *dynamic governance* diadopsi karena kebutuhan untuk merespon berbagai masalah aktivitas pemerintah

**Kata Kunci:** Etika dan akuntabilitas, *dynamic governance*, E-government

### Abstrack

The concept of ethics and accountability of public servants in governance from good governance to dynamic governance is a reference concept that is considered to be able to change government activities properly. Any concept of governance adopted implies to reject various forms of government activities based on authoritarian activities, corruption, collusion, and nepotism that will open up opportunities for other evil acts in carrying out government activities. In this context, dynamic governance becomes central in responding to the challenges faced by the current government so that an innovation related to E-government was born which is an effort to support electronically-based government performance in the context of implementing and improving the quality of services to the community effectively. and efficient The purpose of this paper is to contribute to knowledge by exploring conceptual theoretical and comparing between these concepts from the relevant scientific literature. This paper is a *synthesis of qualitative research*, using the method of *meta-theory (the analysis of theory)*. This paper attempts to identify some of the existing written evidence regarding the research theme. The results of the study revealed that ethics and accountability of public servants in government governance related to dynamic governance were adopted because of the need to respond to various problems of government activities

**Keywords:** Ethics and accountability, dynamic governance, E-government

## 1. Pendahuluan

Etika dan Etis Manajemen adalah dua hal yang bertolak belakang, dimana kebenaran yang menempatkan suatu kerangka etika tidak menjamin adanya perilaku etis. Kebanyakan organisasi, baik dari sektor publik dan swasta, memiliki kode perilaku komprehensif yang dirancang dengan baik, atau persyaratan tata kelola perusahaan yang canggih. Tetapi di sisi lain dalam organisasi itu sendiri masih menciptakan budaya yang memunculkan dipraktikkannya perilaku tidak etis, atau setidaknya dimaafkan. Mekanisme kepatuhan tidaklah cukup di dalam pelatihan etika dan kepemimpinan saja, tetapi pelatihan program perubahan budaya juga perlu diperkenalkan untuk memastikan bahwa kerangka kerja etika diterapkan dan tertanam dalam jalinan organisasi. Manajemen etika semua yang meliputi mekanisme kontrol yang kita kenal, termasuk pembuatan agensi etika, kode etik, dan sanksi karena melanggar kode etik. Sebaliknya, manajemen etis adalah mengenai bagaimana individu mengatur perilaku dengan integritas, bagaimana mereka menjadi contoh figur, dan bagaimana mereka memperlakukan orang lain di dalam atau di luar organisasi. Namun, manajemen etika menemukan ekspresinya melalui manajemen etis. Kerangka etis dimediasi melalui tindakan manajer individu yang memperlakukan orang lain dengan hormat

Konsep kepatuhan yang harusnya dikembangkan adalah bukan hanya dalam konteks *compliance with regulation*, tetapi juga harus meliputi *compliance with law*, Organisasi sendiri juga memiliki peraturan, baik formal dan informal, yang membatasi tindakan individu. Beberapa peraturan akan menuntut sikap yang etis; sementara yang lain akan bersikap netral berkenaan dengan etika. Pada saat bersamaan, organisasi pelayanan publik,

khususnya, diharapkan untuk merespon kepentingan warga negara, klien, dan pelanggan dan beberapa ekspektasi ini akan diperhatikan dengan standar perilaku oleh pejabat terpilih dan yang ditunjuk. Haruslah disadari bahwa keberhasilan suatu organisasi adalah atas dasar kepedulian orang lain dalam hal ini adalah publik yang berhubungan dengan organisasi. Bahwa usaha untuk mendapatkan image yang baik adalah dalam rangka menciptakan publik; *understanding, confidence, support, cooperation*. Oleh karena itu agar tujuan untuk dapat mencapai adanya image yang baik maka dalam ini *Public Relation officer* berfungsi menyampaikan policy/kebijaksanaan

yang berlaku dalam organisasi kepada publik.

Dalam sebuah organisasi diperlukan konsep *Dynamic Governance* adalah budaya yang diinstitusionalisasikan, dua pengaruh utama (*able people and agile processes*) untuk mengembangkan 3 (tiga) kemampuan *Dynamic Governance*. Faktor eksternal oleh *Future Uncertainties* dan *External Practices* Konsep *dynamic governance* telah menjadi sangat populer di era milenial yang sangat cepat mengalami perubahan di berbagai bidang kehidupan, tidak terkecuali penyelenggaraan pemerintahan sebagai akibat dari perkembangan yang begitu pesat dari teknologi informasi. Namun, hal mendasar terhadap penyelenggaraan pemerintahan tidak pernah beranjak dari tuntutan prosesnya

Oleh sebab itu Melalui pemanfaatan *e-government*, pelayanan pemerintah yang birokratis dan terkesan kaku dieliminir menjadi lebih fleksibel dan lebih berorientasi pada kepuasan pengguna. *E-government* menawarkan pelayanan publik yang bisa diakses secara 24 jam, kapan pun, dan dari manapun pengguna berada. *E-government* juga memungkinkan pelayanan publik tidak dilakukan secara *face – to - face* sehingga pelayanan menjadi lebih efisien. *E-government* dapat didefinisikan sebagai seluruh tindakan dalam sektor publik (baik pusat maupun daerah) yang melibatkan teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan mengoptimalkan proses pelayanan publik yang efisien, transparan, dan efektif telah menjadi bagian penting dalam usaha untuk membangun tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia

Pemanfaatan atau pengembangan *e-government* merupakan upaya untuk mendukung kinerja pemerintah yang berbasis elektronik dalam rangka penyelenggaraan dan peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat secara efektif dan efisien. Melalui pengembangan dan penerapan *e-government* dilakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan instansi pemerintah khususnya instansi yang melaksanakan fungsi pelayanan publik. Dengan berjalannya *e-government* ini maka diharapkan seluruh aktivitas organisasi pemerintah dapat dilaksanakan secara elektronik sehingga mempermudah fungsi kebijakan dan pelayanan

## 2. Metode Penulisan

Metode dalam makalah penulisan ini adalah *synthesis of qualitative research*. Metode yang diartikan sama dengan kata *synthesis of qualitative research* seperti *meta-narrative synthesis*, *critical interpretive synthesis*, *meta-study*, *metaethnography*,

grounded formal theory, thematic synthesis, textual narrative synthesis, framework synthesis, and ecological triangulation (Barnett & Thomas, 2009). Barnett & Thomas (2009:7) kembali menjelaskan, *meta-study* mempunyai tiga komponen analisis yakni *meta-data-analysis (the analysis of findings)*, *meta-method (the analysis of methods)*, and *meta-theory (the analysis of theory)*. Lebih spesifik artikel penelitian ini menggunakan *theory (the analysis of theory)*.

Penggalian data pada penulisan ini dilakukan secara deduktif atau *theoretical and analytical frameworks*, yang berasal dari berbagai literatur ilmiah baik bersumber dari buku maupun jurnal. *Meta-theory* bisa digunakan untuk mengidentifikasi kerangka teori yang berhubungan dengan teoriteori sosial, sejarah, budaya dan politik (Paterson, et.al, 2001).

### 3. Pembahasan

#### 1. Pemetaan Manajemen dan Kepemimpinan

Garis dalam etika berorganisasi, adalah sesuatu yang samar antara manajemen dan kepemimpinan. Aspek kepemimpinan inspirasional sangatlah penting dan bisa dilihat untuk menumbuhkan hubungan yang dibutuhkan untuk budaya kepercayaan dan keterbukaan. Dan juga hal tersebut harus diapresiasi bahwa mayoritas kebijakan etis dan kerangkanya hadir sebagai reaksi dari kegiatan-kegiatan (bukan sebagai hasil dari kepemimpinan), dan dihidupkan kembali melalui kerangka peraturan (membutuhkan pendekatan manajerial yang lebih tradisional). **Skema 1 menunjukkan peta hubungan antara manajemen dan perspektif kepemimpinan terhadap spektrum pemenuhan dan sistem integritas**

MAPS : THE SPECTRUM OF COMPLIANCE AND INTEGRITY SYSTEM		INTEGRITY	
		LOW	HIGH
C O M P L I E N C E	LOW	ETHICS MINIMA	ETHICAL MANAGEMENT
	HIGH	ETHICS MANAGEMENT	ETHICAL LEADERSHIP

**Ethics Minima** (pemenuhan rendah/integritas rendah) terjadi dalam organisasi yang tidak melihat etika sebagai hal relevan dan tidak lebih dari tambahan bisnis inti. Kepemimpinan bersifat sangat reaktif dan hanya hukum minimum standar yang dipertahankan. Tidak ada komitmen personal pada etika dan bukanlah bagian dari budaya organisasi.

**Ethics Management** (pemenuhan penuh/integritas rendah) terjadi dalam organisasi yang melihat etika sama pentingnya tetapi bukanlah bagian yang penting dalam budaya. Menekankan pada akuntabilitas: memperbarui peraturan dan perundangan, kode etik, dan lainnya. Setelah persyaratan hukum/institusional terpenuhi, permasalahan etis dikesampingkan. Gayanya mungkin dikarakteristikan seolah-olah organisasi melakukan hal yang benar.

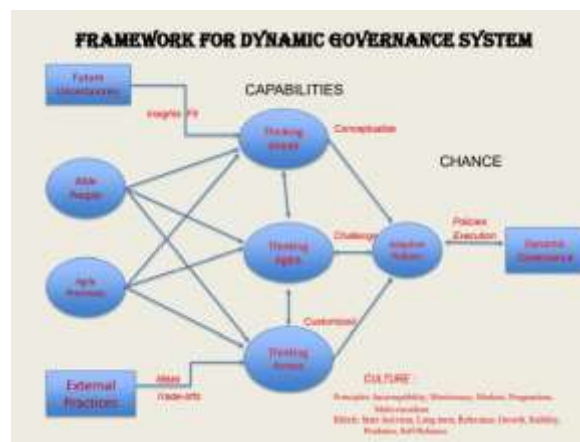
**Ethical Managament** (pemenuhan rendah/integritas tinggi) terjadi dalam organisasi dimana kerangka etis memiliki komitmen kuat dengan satu atau dua anggota. Anggota-anggota ini memperjuangkan agenda etis dan mungkin dilihat untuk mewujudkan etika dalam organisasi. Kepemimpinan dalam organisasi ini mungkin kuat secara individu, namun, kebutuhan kerangka dan infrastruktur diabaikan, mengarah pada masalah etis jika/ketika kepemimpinan berubah. Gayanya mungkin dikarakteristikan seolah-olah organisasi melakukan hal yang benar.

**Ethical Leadership** (pemenuhan tinggi/integritas tinggi) terjadi dalam organisasi yang memiliki komitmen personal yang kuat dan infrastruktur yang diperlukan untuk memastikan bahwa etika tertanam dalam budaya organisasi. Pemimpin bersikap proaktif dan berusaha untuk mengembangkan semua individu untuk mencapai akuntabilitas, transparansi, dan agensi moral individu yang berkembang

Organisasi dikarakteristikan seolah-olah melakukan hal yang benar. Matriks ini menyoroiti bahwa manajemen dan kepemimpinan dalam etika berorganisasi adalah tentang hubungan antara individu dan institusi. Kualitas tidaklah cukup untuk memastikan budaya etis yang kuat dan memerlukan kerangka organisasi yang kuat agar sukses. Seperti yang dibahas di awal bab ini, organisasi tidak harus membuat pilihan: organisasi haruslah bias beradaptasi dan mengambil pendekatan holistik agar etika berkembang.

## 2. Framework For Dynamic Governance System

Gambaran tentang Pemerintah pada umumnya sangat jauh dari perspektif dinamis. Sebaliknya, Pemerintah – khususnya birokrasi pemerintah – seringkali dipahami sebagai entitas yang lambat, birokrasi yang ketinggalan jaman, kaku dan tidak memiliki perhatian baik terhadap kepentingan dan kebutuhan individu maupun bisnis (Neo & Chen, 2007, p. 1). Kondisi ini bertolak belakang sekali dengan makna dinamis sebagaimana diuraikan pada bagian sebelumnya, yang dicirikan oleh ide-ide baru, persepsi-persepsi yang kekinian, upaya perbaikan yang terus-menerus, tindakan yang cepat dan responsif, daya adaptasi yang fleksibel, cepat dan eksekusi tindakan yang efektif, serta perubahan yang terus-menerus. Skema berikut menunjukkan kerangka untuk dynamic governance dengan keterkaitan antar elemennya



Dynamic governance yang merupakan outcome yang diharapkan, terwujud manakala kebijakan-kebijakan yang adaptif (adaptive policies) dilaksanakan. Adaptasi atas kebijakan ini tidak dilakukan secara pasif, akan tetapi proaktif melalui berbagai inovasi, kontekstualisasi dan implementasi. Adapun yang menjadi dasar dari proses menghasilkan dynamic governance adalah landasan nilai budaya (institutional culture) yang dimiliki oleh bangsa. Nilai budaya ini pada gilirannya akan mempengaruhi perilaku. Tiga kapabilitas dinamis, yakni *thinking ahead*, *thinking again*, dan *thinking across* yang memfasilitasi kebijakan-kebijakan adaptif. Kapabilitas ini harus tertanam dan termanifestasi dalam strategi dan proses kebijakan (membuat pilihan kebijakan, implementasi dan evaluasi) dari lembaga-lembaga pemerintah sehingga mereka senantiasa terus belajar, berinovasi dan

beradaptasi dengan perubahan

Kapabilitas *think ahead* pada prinsipnya merupakan kemampuan untuk mengidentifikasi perkembangan lingkungan, memahami konsekuensinya di masa datang terhadap tujuan ekonomi dan sosial, dan mengidentifikasi strategi investasi dan pilihan yang tepat sehingga memungkinkan semua elemen masyarakat dapat mengeksplorasi berbagai kesempatan baru dan mampu mengatasi berbagai potensi ancaman. Proses melakukan *thinking ahead* melibatkan:

- a) mengeksplorasi dan mengantisipasi tren dan perkembangan masa depan yang memiliki dampak signifikan terhadap sasaran kebijakan,
- b) memahami bagaimana perkembangan ini akan mempengaruhi pencapaian tujuan saat ini, dan menguji keefektifan strategi, kebijakan dan program yang ada,
- c) menyusun strategi opsi apa yang dapat digunakan untuk menghadapi ancaman yang muncul dan mengeksplorasi peluang baru, dan
- d) mempengaruhi pengambil keputusan utama dan pemangku kepentingan untuk dipertimbangkan isu-isu yang muncul dan melibatkan mereka dalam percakapan strategis tentang respon yang akan dilakukan (Neo & Chen, 2007, pp. 32–33).

Kapabilitas *think again* menyangkut kemampuan untuk menilai kinerja strategi, kebijakan dan program yang ada, untuk kemudian di desain kembali untuk mencapai hasil yang lebih baik. Proses melakukan *thinking again* melibatkan:

- a) Meninjau dan menganalisis data kinerja aktual dan memahami umpan balik dari publik,
- b) Menyelidiki penyebab yang mendasari umpan balik atau fakta yang diamati, informasi dan perilaku, baik untuk memenuhi atau mengetahui target yang hilang,
- c) Meninjau kembali strategi, kebijakan, dan program untuk diidentifikasi karakter dan aktivitas yang berfungsi dengan baik maupun yang tidak,
- d) Mendesain ulang kebijakan dan program, sebagian atau seluruhnya, sehingga kinerja mereka dapat ditingkatkan dan tujuan tercapai, dan
- e) Menerapkan kebijakan dan sistem baru sehingga warga dilayani dengan

lebih baik dan menikmati hasil yang berarti (Neo & Chen, 2007, p. 37).

Kapabilitas *think across* adalah kemampuan untuk belajar dari pengalaman pihak lain, sehingga ide-ide bagus dapat diadopsi dan disesuaikan dengan kondisi internal agar tujuan dapat tercapai lebih baik. Kapabilitas *think across* melibatkan proses:

- a) Mencari praktik-praktik baru dan menarik yang diadopsi dan diimplementasikan oleh orang lain dalam mendekati masalah yang serupa,
- b) Merefleksikan apa yang mereka lakukan, mengapa dan bagaimana mereka melakukannya, dan pelajaran yang mereka pelajari dari pengalaman,
- c) Mengevaluasi apa yang mungkin berlaku untuk konteks lokal, mempertimbangkan kondisi dan keadaan unik, dan apa akan diterima oleh penduduk setempat,
- d) Menemukan hubungan baru antar ide dan kombinasi baru ide-ide berbeda yang menciptakan pendekatan inovatif untuk masalah yang muncul, dan
- e) Menyesuaikan kebijakan dan program agar sesuai dengan persyaratan kebijakan local dan kebutuhan warga negara (Neo & Chen, 2007, pp. 41– 42).

Untuk dapat memiliki kapabilitas *dynamic governance*, terdapat dua pilar utama, yakni sumberdaya manusia yang mampu dan proses yang gesit dan responsif. *Governance system* sangat dipengaruhi oleh lingkungan eksternal melalui ketidakpastian masa depan dan juga berbagai praktek yang dilakukan oleh Negara lain (Neo & Chen, 2007, p. 13).

*Dynamic governance* tercapai melalui berbagai kebijakan yang diadaptasi secara terus-menerus terhadap perubahan yang terjadi di lingkungan sekitar. Adaptasi kebijakan (*policy adaptation*) bukan merupakan reaksi pasif terhadap tekanan yang datang dari luar, tetapi merupakan tindakan proaktif melalui inovasi dengan ide-ide baru yang diinputkan ke dalam berbagai kebijakan untuk hasil yang lebih baik; kontekstualisasi ide-ide baru tersebut agar mendapat dukungan dari masyarakat; dan implementasi atau eksekusi kebijakannya sebagai



manifestasi dari dynamic governance (Neo & Chen, 2007, p. 13).

Pada intinya, dynamic governance terjadi manakala “*policy-makers constantly think ahead to perceive changes in the environment, think again to reflect on what they are currently doing, and think across to learn from others, and continually incorporate the new perceptions, reflections and knowledge into their beliefs, rules, policies and structures to enable them to adapt to environmental change.*” (Neo & Chen, 2007, p. 15) Kapabilitas dinamis inilah yang menjadi kunci rahasia keberhasilan Singapura selama lebih dari empat dekade. *Dynamic governance* bisa terwujud secara berkelanjutan ketika “*there is a long-term commitment to and investments in building each of the elements in the system and designing the necessary linkages for them to work as a whole.*” Perlu digarisbawahi pula bahwa “*the interdependent, interacting and reinforcing flows*” merupakan detak jantung dari *dynamic governance*. Tanpa itu, tidak akan pernah ada *dynamic governance*.

### 3. *Public Administration as Governance forward by Misuraca (2007)*

Misuraca (2007) mencoba untuk mendefinisikan konsep Pemerintahan sebagai proses yang membahas alokasi sumber daya untuk menanggapi masalah kolektif dan ini harus dilihat sebagai aspek positif dari pemerintahan. Misuraca (2007: 13) mengutip UNDP (1997) mengidentifikasi lebih lanjut berikut ini sebagai prinsip-prinsip utama pemerintahan yang baik; transparansi, akuntabilitas, partisipasi, supremasi hukum, efektivitas dan visi strategis

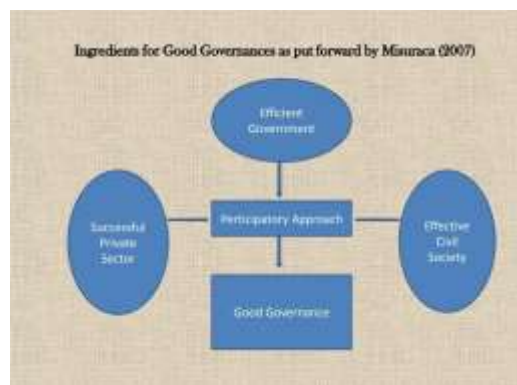


Diagram di atas mencoba menjelaskan apa yang dilihat Misuraca (2007) sebagai Kunci bahan untuk pemerintahan yang baik. Pemerintahan yang efisien, swasta yang sukses sektor ditambah masyarakat sipil yang efektif semua

mengadopsi pendekatan partisipatif penting untuk pemerintahan yang baik. Misuraca (2007) meskipun tidak mendefinisikan pemerintahan yang buruk, berpendapat bahwa itu benar ditandai dengan personalisasi kekuasaan, korupsi serta tidak terpilih dan pemerintah yang tidak bertanggung jawab

Selain itu government juga memiliki banyak manfaat guna menunjang efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. Seperti yang diungkapkan oleh Misuraca (2007) yang menyebutkan bahwa terdapat tiga dimensi dalam melihat manfaat dari penerapan e-government, yaitu dimensi, ekonomi, sosial, dan pemerintahan

1. Dimensi ekonomi. Dalam hal ekonomi, manfaat e-government di antaranya yaitu mengurangi biaya transaksi untuk kapasitas yang lebih baik dengan target pelayanan, peningkatan cakupan dan kualitas penyampaian pelayanan, meningkatkan kapasitas respon dalam mengatasi permasalahan isu-isu kemiskinan dan meningkatkan pendapatan.
2. Dimensi sosial. Dalam hal sosial, manfaat e-government cukup beragam mulai dari penciptaan lapangan kerja di sektor ketiga, peningkatan sistem pendidikan dan kesehatan, penargetan yang lebih baik atas pelayanan pemerintah, peningkatan kapasitas dalam penyediaan keselamatan dan keamanan. Pada banyak kasus manfaat-manfaat ini dapat dievaluasi dalam istilah-istilah politik dan dapat dikuantifikasi dalam istilah keuangan.
3. Dimensi pemerintahan. Dalam hal pemerintahan, manfaat e-government dapat meningkatkan tercapainya good governance dalam hal peningkatan keterbukaan, transparansi, akuntabel atau demokratis dibandingkan pemerintahan yang konvensional. E-government juga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat sehingga dapat mengokohkan sistem demokrasi yang ada.

#### **4. Public Administration as e-governance**

Dari segi paradigma di bidang Administrasi Publik, e-Governance bisa dilihat dari tiga perspektif berbeda yang akan dibahas di bawah ini. Pertama, jika argumen Chadwick (2006: 179) bahwa pengenalan TIK masuk pemerintahan terutama membantu pemerintah menjadi efisien dalam pengiriman barang dan layanan dikedepankan, e-Governance dapat ditempatkan di Administrasi

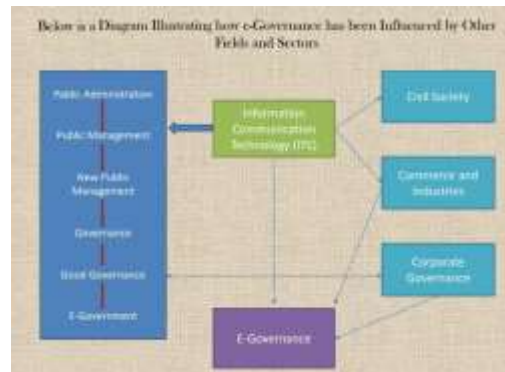
Publik sebagai paradigma New Public Management. Ini karena disinilah temanya efisiensi dan efektivitas didominasi pemerintah. Dalam hal ini, pendahuluan TIK di pemerintahan bisa dilihat hanya sebagai alat yang dimaksudkan untuk memastikan bahwa tujuan NPM terpenuhi. Namun pandangan ini mengabaikan fakta bahwa dalam e-Governance, TIK tidak hanya digunakan dalam operasi pemerintahan melainkan mereka melampaui untuk mempengaruhi bagaimana pemerintah berhubungan dengan pemangku kepentingan lainnya di masyarakat

Kedua, pengenalan TIK dalam administrasi urusan publik bisa dianggap telah mengakar praktik demokrasi dalam masyarakat (Misuraca, 2007: 9). Pandangan ini secara khusus melihat peningkatan dalam berbagi informasi antara pemerintah dan pemangku kepentingan di masyarakat sebagai akibat dari pengenalan TIK sebagai perkembangan utama dalam Administrasi Publik. TIK telah memberikan kedua pemerintahan dan kesempatan warga negara untuk berinteraksi sehingga meningkatkan pemerintahan yang baik. Satyanarayana (2004: 1) dengan tepat mengemukakan hal tersebut saat dia berpendapat bahwa TIK masuk pemerintah dimaksudkan untuk meningkatkan akses, transparansi dan akuntabilitas. Dalam hal ini, e-Governance dapat dilihat sebagai milik Administrasi Publik sebagai Paradigma tata kelola.

Terakhir, dapat dikatakan bahwa e-Governance perlu dilihat sebagai sebuah paradigma dengan dirinya sendiri. Diskusi sebelumnya menunjukkan bahwa akademisi dan praktisi telah mengubah preferensi konseptual tentang Administrasi Publik sebagai bidang studi di zaman sejarah yang berbeda. Adopsi TIK dalam menjalankan pemerintahan telah mengubah karakternya. Ini benar apakah dilihat dari internal pemerintahan sudut pandang operasi (G2G) atau dari bagaimana pemerintah berinteraksi dengan orang lain pemangku kepentingan (G2C dan G2B). Muhammad dan Abu Momtaz (2007: 31) berdebat bahwa pengenalan TIK dalam pemerintahan telah meningkatkan citra pemerintah di mata warga. Sudah lama pemerintah dikaitkan dengan kekakuan, pemborosan dan tidak responsif antara lain

Harus diakui bahwa e-Governance sebagai pembangunan di depan umum Administrasi sangat dipengaruhi oleh perkembangan di sektor lain seperti Teknologi Komunikasi Informasi dan Perdagangan. Perkembangan ini bidang

memiliki dampak signifikan pada e-Governance. Di bawah ini adalah ilustrasi diagram bagaimana e-Governance dipengaruhi oleh bidang dan sektor lain



Administrasi, ada juga yang berkembang di daerah lain yang sudah punya pengaruh pada e-Governance seperti yang kita kenal sekarang. Kontribusi utama adalah daritentu saja dari bidang TIK karena setiap perkembangan di bidang ini berdampak adopsi dan penggunaan TIK di pemerintahan. Seperti yang dinyatakan sebelumnya, pengenalan tata kelola perusahaan di sektor swasta mempengaruhi paradigma tata keloladan akibatnya e-Governance. e-Governance juga sangat bergantung tentang adopsi TIK oleh masyarakat sipil. Dapat dikatakan bahwa perkembangan Administrasi Publik digabungkan dengan kontribusi dari bidang Perdagangan dan TIK telah melahirkan anegara berubah dalam Administrasi Publik. Para sarjana tidak bisa mengabaikan ini perkembangan maka makalah ini berpendapat bahwa e-Governance adalah paradigma baru dalam Ilmu Pemerintahan

#### 4. Penutup

Berdasarkan hasil pembahasan berikut dapat disimpulkan bahwa:

1. Garis dalam etika berorganisasi, adalah sesuatu yang samar antara manajemen dan kepemimpinan peta hubungan antara manajemen dan perspektif kepemimpinan terhadap spektrum pemenuhan dan sistem integritas *Ethics Minima* (pemenuhan rendah/integritas rendah) *Ethics Management* (pemenuhan penuh/integritas rendah) *Ethical Managment* (pemenuhan rendah/integritas tinggi) *Ethical Leadership* (pemenuhan tinggi/integritas tinggi)
2. Dynamic governance yang merupakan outcome yang diharapkan, terwujud manakala kebijakan-kebijakan yang adaptif (adaptive policies) dilaksanakan. Adaptasi atas kebijakan ini tidak dilakukan secara pasif, akan tetapi proaktif melalui

berbagai inovasi, kontekstualisasi dan implementas

3. Pemerintahan yang efisien, swasta yang sukses sektor ditambah masyarakat sipil yang efektif semua mengadopsi pendekatan partisipatif penting untuk pemerintahan yang baik.
4. Paradigma di bidang Administrasi Publik, e-Governance bisa dilihat dari tiga perspektif berbeda pengenalan TIK masuk pemerintahan terutama membantu pemerintah menjadi efisien dalam pengiriman barang dan layanan dikedepankan,, pengenalan TIK dalam administrasi urusan publik bisa dianggap telah mengakar praktik demokrasi dalam masyarakat -Governance perlu dilihat sebagai sebuah paradigma dengan dirinya sendiri.

## Daftar Pustaka

### Buku

Muhafidin, H. D., SIP, M. S., Yadiman, H., & SH, M. (2020). *Etika Administrasi Publik: Edisi Revisi*. Penerbit Andi.

Neo, B. S., & Chen, G. (2007). *Dynamic governance: Embedding culture, capabilities and change in Singapore (English version)*. World Scientific

### Jurnal

Irawan, A. (2018). Sistem Pelayanan Publik Berbasis E-Government Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke. *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Sosial*, 7(1), 20-37.

Lusiawati, I. (2020). Public Relations Dalam Etika Dan Etis Manajemen. *Jurnal TEDC*, 14(1), 35-42.

Mukonza, R. M. (2014). E-governance: a new paradigm in public administration. *Journal of Public Administration*, 49(2), 499-511.

Rahmatunnisa, M. (2019). Dialektika Konsep Dynamic Governance. *Jurnal Academia Praja*, 2(02).